

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MA DARUSSLAM
DERU BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMATULLOH
D03216030



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Dosen pembimbing

Dr. Hanun Asrohah M. Ag.
19684101995032002

Ali Musthofa M. Pd.

197612252005011008

PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMATULLOH

NIM : D03216030

JUDUL : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI
MA DARUSSALAM DERU BOJONEGORO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 23 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



RAHMATULLOH

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

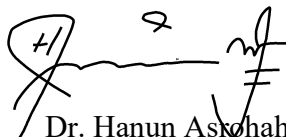
Skripsi oleh:

NAMA : RAHMATULLOH
NIM : D03216030
JUDUL : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI
MA DARUSSALAM BOJONEGORO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 20 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Hanun Astrohah M. Ag
19684101995032002

Pembimbing II



Ali Musthofa. M.pd
197612252005011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Rahmatulloh ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Surabaya, 23 Juni 2020

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. H. Ali Masud, M. Ag, M. Pd. I

NIP. 196301231993031002

Penguji I,

Dr. Arif Mansyuri, M. Pd

NIP. 197903302014111001

Penguji II,

Machfud Bachtiar, M. Pd

NIP. 197704092008011007

Penguji III,

Dr. Hanun Asrohah, M. Ag

NIP. 196804101995032002

Penguji IV,

Ali Mustofa, M. Pd

NIP. 197612252005011008



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMATULLOH
NIM : D03216030
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/ MPI
E-mail address : Virusrahmatvirus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BATUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MA DARUSSALAM DERU BONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

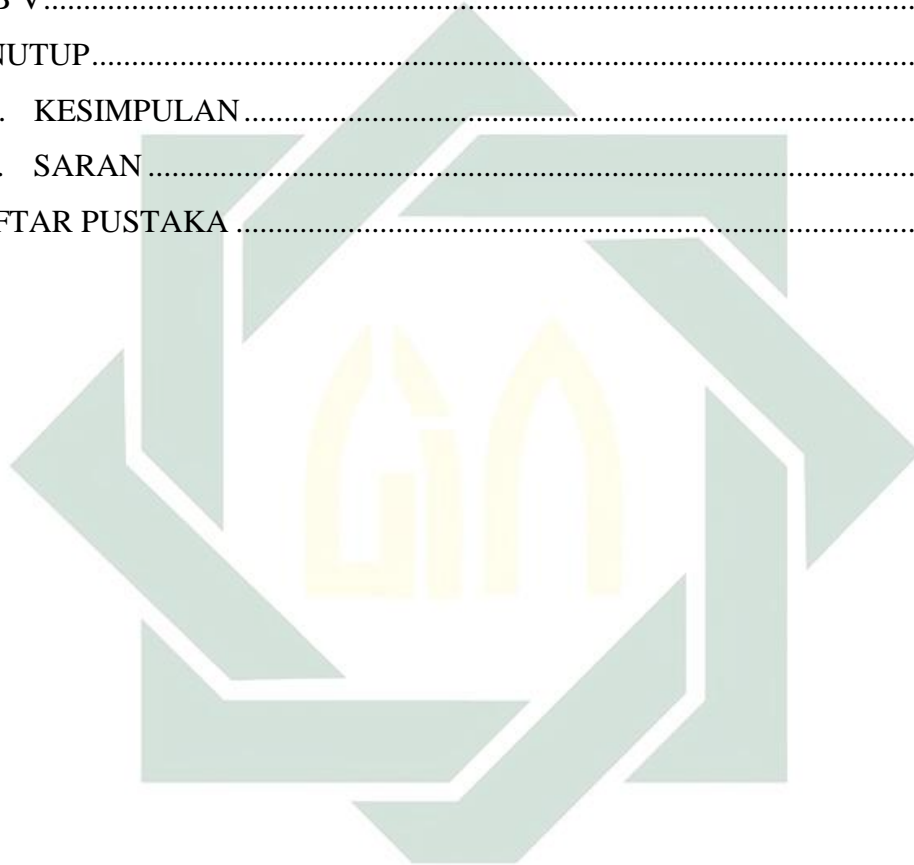
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2020

Penulis


Rahmatulloh

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS di Madrasah Aliyah Darusslam Bojonegoro.....	87
2. Pelaksanaan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Deru Bojonegoro.....	96
3. Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro.....	100
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah faktor dalam pencapaian tujuan nasional negara indonesia yang sudah tercantumkan dalam Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1s/d 3 dinyatakan bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka menerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan hal tersebut bahwasanya begitu penting pendidikan sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa.¹

Akan tetapi dalam kenyataannya, dunia pendidikan di indonesia masih memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik oleh pemerintah, madrasah dan masyarakat agar mutu dalam pendidikan di indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang.

Menurut Handayani bahwa persoalan pendidikan antara lain adalah kurangnya tenaga guru yang profesional, kinerja dan kesejahteraan guru yang

¹ UUD Republik Indonesia pasal 31 ayat 1-3

Standar isi merupakan cakupan sekumpulan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut meliputi, kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kelender pendidikan.

Standar proses merupakan proses pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan. Hal tersebut diartikan bahwa segala pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau biasa disebut Kegiatan belajar mengajar (KMB). Baik dalam perencanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta pengawasan pembelajaran. Hal seperti itu harus di tata serapi mungkin, agar proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam kelas dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan, seorang pendidik yang ada dalam instansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik.

[illegible]

Standar pembiayaan pendidikan, pembiayaan meliputi 3 hal yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggara dan pengelolaan pendidikan, serta biaya probadi peserta didik. Standar penilaian pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pemerintah memiliki delapan standar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan melalui standar pembiayaan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan memiliki peran yang sangat penting yang masuk dalam kategori pendidikan pemerintah.

[illegible]

Anggaran untuk menunjang pendidikan bukan hanya berupa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun biaya anggaran yng berupa anggaran biaya pendapatan daerah (APBD), tetapi biaya dapat bersumber dari masyarakat umum. Dalam hal biaya yang didapatkan sekolah melalui peserta didik (Orang tua). Biaya yng diterima oleh pihak sekolah tidak hanya dari pemerintah saja melainkan ada campur tangan masyarakat dalam donatur anggaran pendidikan. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan merupakan keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan dan kemajuan yang akan mengantarkan pada pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.

[illegible]

didik, orang tua atau wali (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.³

Pandangan diatas dapat menjelaskan bahwa setiap warga negara indonesia membutuhkan pendidikan, terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya baru sebagian saja lembaga pendidikan yang dalam akan hal ini yaitu sekolah masih belum mendapatkan pemerataan pendidikan dari pemerintah, khususnya dalam pembiayaan pendidikan.

Pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa sistem pendidikan nasional harus bisa menjamin meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan guna menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara indonesia harus mendapatkan pendidikan yang baik terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya baru sebagian yang mendapatkan biaya pendidikan layak. Sampai saat ini masih banyak sekolah yang masih belum mendapatkan pemerataan pendidikan oleh pemerintah, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan.

Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan berkualitas tinggi. BOS adalah sebuah program pemerintah untuk meringankan biaya operasional sekolah yang berasal dari PKPS-BBM. Yang dimaksud dalam PKPS- BBM bidang pendidikan ialah program bantuan biaya

³ PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2

Dalam konteks ini, pembiayaan/keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran dilembaga pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola keuangan madrasah dengan baik, bertanggungjawab dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.⁵

Untuk mencapai tujuan dan harapan dari sebuah pendidikan agar mendapatkan output yang berkualitas juga maka harus ada keseimbangan dengan biaya pendidikan yang memadai. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya ataupun sarana prasaranya harus dengan biaya yang cukup besar. Dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dengan biaya mempunyai kaitan yang sangat erat dalam menunjang proses pendidikan dalam ketercapainya suatu tujuan pendidikan.

⁵ Sukistrtyiorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 129-130

Selain hal tersebut sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola biaya juga mempunyai pengaruh besar terhadap ketercapaiannya tujuan pendidikan. Banyaknya biaya yang dikeluarkan tanpa adanya kemampuan dalam pengelolaan manajemen biaya, maka yang terjadi adalah pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran dan pemborosan sementara.

Proses pendidikan akan mengacu pada prinsip transparansi. Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat dilaporkan dan pertanggungjawabkan secara terperinci. Tidak hanya sebatas pada pelaksanaannya saja akan tetapi perlu adanya penyajian laporan yang jelas yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang sudah menyangkut tentang pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan secara detail yang sudah dicatatkan dalam laporan yang dibuat. Kalaupun memang dikeluarkan untuk pelaksanaan program, harus jelas program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu.

Prinsip transparansi ini sangat diperlukan dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tersalurnya anggaran yang diterima pada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Jika tidak maka harus segera ditindak lanjuti dan mencari solusi dan jalan keluar yang baik. Adanya asas transparansi biaya pada pembiayaan pendidikan dapat mengantisipasi segala anggapan yang bersifat negatif dari berbagai pihak.

Pengeluaran maupun pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Adanya anggapan yang

Manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dan sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah.

[illegible]

Dari standar tersebut standar pembiayaan yang menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan. Dikarenakan peserta didik yang berdominasi keluarga berekonomi menengah kebawah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan demi berjalannya proses kegiatan membutuhkan pengelolaan keuangan yang professional baik dalam pencarian sumber dana atau pedistribusiannya dana MA Darussalam Deru Bojonegoro dalam mengelola keuangan dipegang oleh bendahara umum, komite dan dibantu oleh kepala madrasah sebagai biaya masuk maupun keluar.

[illegible]

1. Manfaat teoritis

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

b. Bagi almamater

c. Bagi sekolah

[illegible]

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti harus memberikan definisi konseptual agar terdapat kesamaan pandangan antara pembaca dan juga peneliti dalam menafsirkan judul penelitian serta memahami permasalahan dan hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti memberikan definisi konseptual sebagai berikut:

Manajemen adalah ilmu atau seni yang mempelajari tentang
pendayagunaan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan organisasi

Pembiayaan pendidikan adalah proses mendapatkan dan mengatur pemasukan dan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

[illegible]

1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Saifudin dengan judul Analisis Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusi menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakna metode deskriptif kualitatif, sumber dari data primer dan sekunder, dengan tehnik pengumpulan data obeservasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggnkana metode *purposive sampling*, populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah beserta staff SMP Global Madani untuk menganalisa penulis menggunakan editing, organizing dan analyzing dengan metode berfikir deduktif.

[illegible]

Sketsa penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad faizal fahmi dengan judul Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan 2 orang guru sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini adalah di madrasah aliyah pembaharuan ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 tata usaha dan 2 orang guru melalui pertanyaan yang diajukan.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Proses perencanaan pembiayaan di *Bakong Pittaya School* dilakukan mulai awal bulan April sampai dengan Juni. Dalam tiga bulan tersebut, *Bakong Pittaya School* akan melakukan rapat bersama dewan yayasan dan guru, kemudian akan di sahkan oleh yayasan yang nantinya akan diajukan kepada pihak Kerajaan Thailand. Setelah diterima, pihak kerajaan akan memberikan dana sesuai dengan laporan jumlah siswa. Proses pembelanjaan pembiayaan di *Bakong Pittaya School* berupa dana yang diperoleh dari kerajaan sebesar 1,4 juta THB untuk seluruh biaya operasional, sedangkan biaya untuk gaji guru dan karyawan sebesar 1,2 juta THB. Proses Proses pengawasan dilakukan oleh departemen pendidikan setempat yang dilakukan pada awal dan akhir semester. Sedangkan dilingkup sekolah adalah manajer utama sendiri yang dilakukan secara insidental. Proses pertanggungjawaban pembiayaan di *Bakong Pittaya School* berupa laporan terperinci dengan memuat bukti pengeluaran dan pemasukan berupa kwitansi yang akan disampaikan setiap bulan Maret . Hambatan *Bakong Pittaya School* dalam pembiayaan pendidikannya adalah ketika dana yang diberikan oleh pihak kerajaan tidak cukup untuk memenuhi segala kegiatan.

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini mengemukakan kajian pustaka yang sudah dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu : pertama, manajemen pembiayaan kedua : ruanglingkup manajemen pembiayaan pendidikan, yang ketiga ; pembiayaan pendidikan melalui program BOS

BAB III : Metode Penelitian

[illegible]

BAB V : Penutup

Setelah pembahasan dari kelima bab tersebut, maka pada bagian akhir dari penelitian ini peneliti menyertakan beberapa lampiran yang dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan menjadi rujukan dari inti pembahasan didalam penelitian.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses dalam mengatur manusia, uang, bahan-bahan, perlengkapan dan metode secara efektif untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu melalui fungsi manajemen antara lain yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan konsekuen. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen dapat berjalan melalui orang lain, uang, barang, perlengkapan dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya manajemen ialah suatu proses mengatur orang lain mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi yang dilakukan secara berkala agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

¹¹ Barnawi dan M. Arigfin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012) h. 14

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standart pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai syarat mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki kompenen dalam kaitanya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung serta biaya rutin sekolah. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan mempunyai kajian tersendiri dalam kaitanya dna mempunyai fungsi dala prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yautu bagaimana memperoleh biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut.

[illegible]

Suatu biaya penting keberadany dalam organisais, terlebih pada duni apendidikan. Akan tetapi bukan seberapa besar biaaya tersbeut direncanakan untuk paa dan bagaimna cara pelaksanaanya dala menggunakan anggaran tersebut. Dapat dikatakan bahwa segala hal yang telah direncanakan sejak awal, apabila mendapati segala yang terjadi dalam proses berjalanya maka harus segera dimusyawarahkan dan secepatnya mencari alternatif atau jalan keluar yang baik.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada sistem pendidikan. Tanpa adanya biaya yang mendukung pada proses pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu hanya dalam angan anagan semata. Segala hal yang berkaitan dengan proses melaksanakan pendidikan yang berjalan disekolah berkaitan dengan biaya.

Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga yang dapat dihargai dengan uang.¹⁴

Dari beberapa kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa biaya adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan dala bentuk barang atau uang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis manajemen berbasis sekolah (MBS). Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu, hubungan antara instansi bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu harus dibuktikan secara empiris. Karena masih banyak faktor yang dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu biaya langsung dan tidak langsung.¹⁵

Biaya langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa atau keluarga siswa, biaya langsung ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data disekolah. Sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara

¹⁴ Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 161

¹⁵ Harsono, *Pengelolaan Pendiidkan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007). H. 10

- Pengeluaran kebutuhan pokok siswa pertahun.
- Pengeluaran guru pertahun berdasarkan rasio guru dan murid.
- Pengeluaran untuk buku teks persiswa dengan rasio buku siiswa
- Pengeluaran untuk bahan dan alat pelajaran habis pakai untuk praktikum persiswa per tahun
- Pengeluaran untuk pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana akademik persiswa pertahun
- Pegeluaran untuk manajemn sekolah yaitu kepala sekolah, staf-staf.
- Pengeluaran utnuk ujian sekolah untuk pembelian bahan alat tulis sekolah
- Pengeluaran untuk daya dan jasa
- Pengeluaran untuk penunjang pertahun

¹⁷ Ibid,48

[illegible]

melakukan aktivitas lebih efisien. Penerapan ABM operasional menggunakan teknik manajemen mutu total dan pengukuran kinerja.¹⁹

ABM strategis berusaha meningkatkan permintaan dan aktivitas dan profitabilitas pada efisiensi aktivitas saat ini atau efisiensi efektivitas yang telah ditingkatkan. ABM strategis berfokus pada pemilihan aktivitas yang tepat untuk operasi. Dengan menggunakan ABM strategis perusahaan meningkatkan profitabilitas melalui aktivitas yang tidak menguntungkan, penghilangan aktivitas yang paling penting dan pemilihan pelanggan yang paling menguntungkan. Penerapan ABM strategis menggunakan teknik manajemen, seperti perancangan proses lima produk pelanggan segmentasi pasar dan saluran distribusi.²⁰

B. Ruang lingkup manajemen pembiayaan

1. Penganggaran

Istilah anggaran seringkali dipahami sebagai entitas rencana. Tapi dalam ranah manajemen keuangan dilembaga pendidikan sering disebut RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah).²¹ Anggaran adalah suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiliki atau dapat diadakan (pendapatan atau pemasukan) untuk membiayai kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pasti memerlukan anggaran untuk menunjang proses kegiatan belajar

¹⁹ Ibid., 49

²⁰ Ibid.

²¹ Haidar Nawawi, *Manajemen Strategis Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 109.

²² Ibid., 110.

[illegible]

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam anggaran tergambar kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan suatu lembaga.²⁵

Dalam kegiatan penganggaran kepala madrasah harus mampu menyusun RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Kepala madrasah harus mengetahui sumber dana yang merupakan sumber daya madrasah diantara lain, antara lain meliputi anggaran rutin Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan (SBPP), bantuan operasional sekolah (BOS), BP3, Donatur, badan usaha, serta sumbangan lainnya. Dalam menetapkan jumlah anggaran ada dua hal

²⁵ Ibid.

Nanang Fattah menjelaskan langkah-langkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya, 3) Menentukan program kerja dan rincian program, 4) Menghitung dana yang dibutuhkan.²⁷ Senada juga dengan Akdon yang menyebutkan bahwa prosedur pertama Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.²⁸

2. Pembukuan

Tahap kedua dalam manajemen per

an pengurusan keuangan. Hal – ha

penyelenggara kegiatan yang terkait dengan pendidikan.²⁹

²⁹ Durotun Nafisah, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah*, 790-791.

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

³⁰ Harbanga Siagian, *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik*, 133.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan terhadap proses pencapaian rencana anggaran. Jones mengatakan pertanggungjawaban merupakan peninjauan terhadap transaksi finansial sebagai penjaminan, keakuratan, kelengkapan, legalitas dan perbandingan apakah yang sedang berjalan sesuai tujuan penganggaran, kegiatan ini terdiri dari pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan dana ke pihak lain yang berhak. Pertanggungjawab juga bisa berfungsi sebagai pengendalian alokasi dana dan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Sehingga proses pengawasan ini wajib dilakukan.³¹

Dari uraian diatas mulai dari estimasi, struktur hingga model dapat ditemukan bahwa estimasi, struktur punya pengaruh besar terhadap model pendidikan, karena pada dasarnya dalam lembaga pendidikan semua biaya mencakup delapan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi biayanya. Dari delapan standar nasional pendidikan tersebut akan diuraikan satu persatu dengan perhitungan yang tepat agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

³¹ Endah Dwi Hayati, *Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah*, 145.

- ### a. Tujuan dan Sasaran Dana BOS

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- 2) Menggratiskan sekolah SD/MI dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
- 5) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di

- [illegible]

3) Pengawasan eksternal.

pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah badan pengawas keuangan (BPKP) instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

Sanksi penyalahgunaan dana BOS sangatlah fatal karena pemerintah bertindak tegas dalam hal ini, pemblokiran sementara bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kabupaten atau Kota dan provinsi, bila mana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan. Secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.³⁴ Dengan adanya sanksi yang tegas dari pemerintah diharapkan sekolah-sekolah yang menerima dana BOS tidak menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain.

D. Auditing Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Auditing adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi

³⁴ Mulyono, MA. *komsep penbiayaan pendidikan*, hlm . 202-205.

Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam pada suatu manajemen perusahaan atau lembaga berstatus sebagai pegawai internal institusi tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral distruktur oraganisasi lembaga dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus auditor internal memiliki kepentingan atas efektifitas

³⁷ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar-ruzz media, 2010). Cet. 1, h. 89

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau auditor yang diluar lembaga tersebut karna memang entitas auditor eksternal bukan dari dalam lembaga tersebut melainkan dari luar yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh suatu lembaga, selain itu auditor eksternal juga memberi tahu karyawan internal lembaga mengenai kelemahan kelemahan yang ada didalam sistem pengendalian intern serta saran perbaikannya.³⁸

[illegible]

B. Kehadiran penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument dan pengumpul data. Peneliti mempunyai peran secara partisipatif dengan mengambil bagian dalam fenomena dan kebiasaan yang akan diteliti. Peneliti kemudian akan melakukan pengamatan yang mendalam dalam pengumpulan data. Selain manusia ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian, hanya saja berfungsi

[illegible]

sebagai pendukung tugas peneliti, bukan sebagai instrument inti. Maka kehadiran seorang peneliti dilapangan sangat diperlukan.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di MA D arusslam Deru Bojonegoro yang bertempat Jl. Raya Puk No. 321, Deru, Sumberrejo, Kab. Bojonegoro. Madrasah ini berstatus Swasta dengan akreditasi B.

D. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagian elemen yang ada di MA Darussslam Deru Bojonegoro yang sekaligus menjadi informan dalam pengumpulan data. Adapun data yang tersaji dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain dimulai dari wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Tahap wawancara peneliti mengambil beberapa informna yang dianggap berkompeten dalam menghasilkan data yang relevan dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MA Darussslam Deru Bojonegoro”.

menyiapkan perlengkapan penelitian dan juga persoalan etika penelitian.⁴³

2. Penelitian

Dalam tahap ini peneliti akan terjun kelapangan untuk melakukan penelitian. Agar penelitian dapat berjalan dan hasil yang diperoleh akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa hal yang peneliti perlu persipkan yaitu : memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lokasi penelitian, berperan serta dalam tehnik pengumpulan data serta menganalisis data.

Peneliti melakukan kegiatan penelitian di MA Darussalam Deru Bojinegoro dengan melibatkan bebrapa informan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Kemudian mengidentifikasi seluruh data tersebut dan menganalisisnya untuk dijadikan sebuah laporan penelitian.

3. Penulisan laporan

Dala penulisan laporan penelitian tidak terlepas akan semua tahapan penelitian. Penulisan laporan ini berfungsi untuk keperluan akademis peneliti. Adapun langkah-langkah dari penulisan laporan ada 3 yaitu : menyusun materi data sehingga bahan tersebut dapat secepatnya tersedia apabila dikemudian hari akan di perlukan, penyusunan kerangka laporan serta penulisan laporan.

⁴³ Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Yogyakarta : Sukses Offset, 2010). H. 284

3. Dokumentasi

H. Teknik Analisis Data

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007) h. 31

Proses analisis data dimulai ketika akan masuk lapangan, sedang dilapangan dan sesudah selesai mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis Miles dan Huberman sebagai berikut :⁴⁸

Reduksi merupakan metode analisis dengan cara merangkum hasil data yang diperoleh, mengambil hal-hal yang penting untuk dikumpulkan dan difokuskan agar data lebih jelas, dengan demikian mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Setelah data direduksi atau dirangkum dan diambil intisarinya, maka proses selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif. Dengan penyajian data akan mempermudah memahami apa saja yang terjadi.

⁴⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006). H. 105

[illegible]

Dalam mengecek keabsahan temuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tehnik pengecekan yaitu :

Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun langkah pengujian keabsahan triangulasi ada 3 yaitu :

- [illegible]

b) Triangulasi dengan metode menurut Paton terdapat 2 strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang serupa.⁵⁰

c) Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Paton berpendapat bahwa hal tersebut dapat dilaksanakan dan dinamakan penjelasan banding. Hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainya.⁵¹

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan referensi. Peneliti memperbanyak refrensi yang berasal dari orang lain maupun refrensi yang diperoleh selama penelitian misalnya

⁵¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h. 258

3. Pengecekan Anggota

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Data	Rincian data
1. Manajemen pembiayaan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah di MA Darussalam Deru Bojonegoro	1. Perencanaan pembiayaan madrasah. 2. Pelaksanaan pembukuan pembiayaan madrasah. 3. Auditing pembiayaan pendidikan madrasah

Kemudian untuk melengkapi masa kebangkitan tersebut tahun 1999 didirikan lembaga baru setingkat SLTA , yaitu Madrasah Aliyah (MA) Darussalam (15 Juli 1999) Dengan Program Studi Yakni Program Study Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2000.siswa yang diambil dari Madrasah Tsanawiyah Darussalam Deru yang sudah lulus, ketika itu yang daftar 20 anak, tapi yang sampai lulus 8 anak, dan berkembang sampai sekarang.

“ TERBENTUKNYA SISWA – SISWI UNGGUL,
BERPRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”

- a. Unggul dalam Pembinaan Agama Islam
- b. Unggul dalam Peningkatan Prestasi UNAS

- #### 4. Misi Madrasah Aliyah Darussalam

- [illegible]

9.	Laboratorium Bahasa	0	1	0
10.	Ruang Perpustakaan	1	0	0
11.	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	0	1	0
12.	Ruang Keterampilan	0	0	0
13.	Ruang Kesenian	0	0	0
14.	Toilet Guru	1	0	0
15.	Toilet Siswa	2	1	0
16.	Ruang Bimbingan Konseling (BK)	1	0	0
17.	Gedung Serba Guna (Aula)	0	0	0
18.	Ruang OSIS	0	1	0
19.	Ruang Pramuka	0	0	0
20.	Masjid/Musholla	1	0	0
21.	Gedung/Ruang Olahraga	0	0	0
22.	Rumah Dinas Guru	0	0	0
23.	Kamar Asrama Siswa (Putra)	0	0	0
24.	Kamar Asrama Siswi (Putri)	0	0	0
25.	Pos Satpam	0	0	0
26.	Kantin	0	2	0

No	Uraian	Kondisi (Unit)				Usia Bangunan	
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah		
1	Ruang Kelas	3	3	0	6	10	Tahun
2	Ruang Kep. Madrasah	0	1	0	1	5	Tahun
3	Ruang Guru	1	0	0	1	7	Tahun
4	Ruang Tata Usaha / TU	1	0	0	1	16	Tahun
5	Ruang Lab. IPA	0	0	0	0	0	Tahun
6	Ruang Lab Komputer	0	1	0	1	7	Tahun
7	Ruang Lab Bahasa	0	0	0	0	0	Tahun
8	Ruang Perpustakaan	0	0	1	1	8	Tahun
9	Ruang Ketrampilan	0	0	0	0	0	Tahun
10	Ruang Kesenian	0	0	0	0	0	Tahun
11	Ruang BP/BK	0	0	1	1	1	Tahun
12	Ruang UKS	0	0	1	1	12	Tahun
13	Ruang Koprasi	0	0	1	1	6	Tahun
14	Ruang Aula	0	0	0	0	0	Tahun
15	Masjid / Musholah	1	0	0	1	27	Tahun
16	Rumah Dinas	0	0	0	0	0	Tahun
17	Ruang Kantin	0	0	1	1	8	Tahun
18	WC Guru	0	0	1	1	7	Tahun
19	WC Siswa	0	0	1	1	7	Tahun

- [illegible]

- v. Terlaksananya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna yang dikembangkan berdasarkan *multiple intelegensi* dengan berbasis TIK.
- w. Terwujudnya budaya belajar, membaca dan menulis.
- x. Tercapainya peningkatan layanan Program Akselerasi
- y. Terwujudnya budaya jujur, ikhlas, sapa, senyum, santun.
- z. Terciptanya budaya disiplin, demokratis, dan beretos kerja.⁵²

B. Temuan penelitian

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan temuan-temuan hasil penelitian yang merupakan uraian dari fokus penelitian yang peneliti angkat yaitu mengenai manajemen pembiayaan pendidikan melalui program bantuan operasional sekolah di MA Darussalam Deru Bojonegoro.

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darusslam Deru Bojonegoro

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat dideskripsikan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan bagi sebuah lembaga merupakan sebuah keniscayaan yang semestinya dipersiapkan, sehingga tujuan dan program madrasah pada tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah dan memperlancar segala program yang akan dilaksanakan.

⁵² Wawancara, Kepala MA Darusslam Bojonegoro, 24 april 2020

Setiap awal tahun ajaran baru kami selaku tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MA Daruslam Deru Bojonegoro, melakukan rapat tahunan rencana anggaran madrasah, sebelum kami melakukan rapat kami terlebih mempersiapkan diri dan menyiapkan berkas untuk rapat penentuan rencana kegiatan dan anggaran madrasah.⁵⁴

Yang berwenang mengatur uang atau dana dari pemerintah adalah bendahara madrasah, yakni saya sendiri. Saya pun dibantu oleh kepala madrasah, kepala tata usaha, komite. Dalam mengelolanya setiap sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai kami melakukan rapat tahunan guna membuat rencana kegiatan dan anggaran madrasah.⁵⁵

⁵³ Wawancara, kepala MA Darusslam Deru Bojonegoro, 25 April 2020

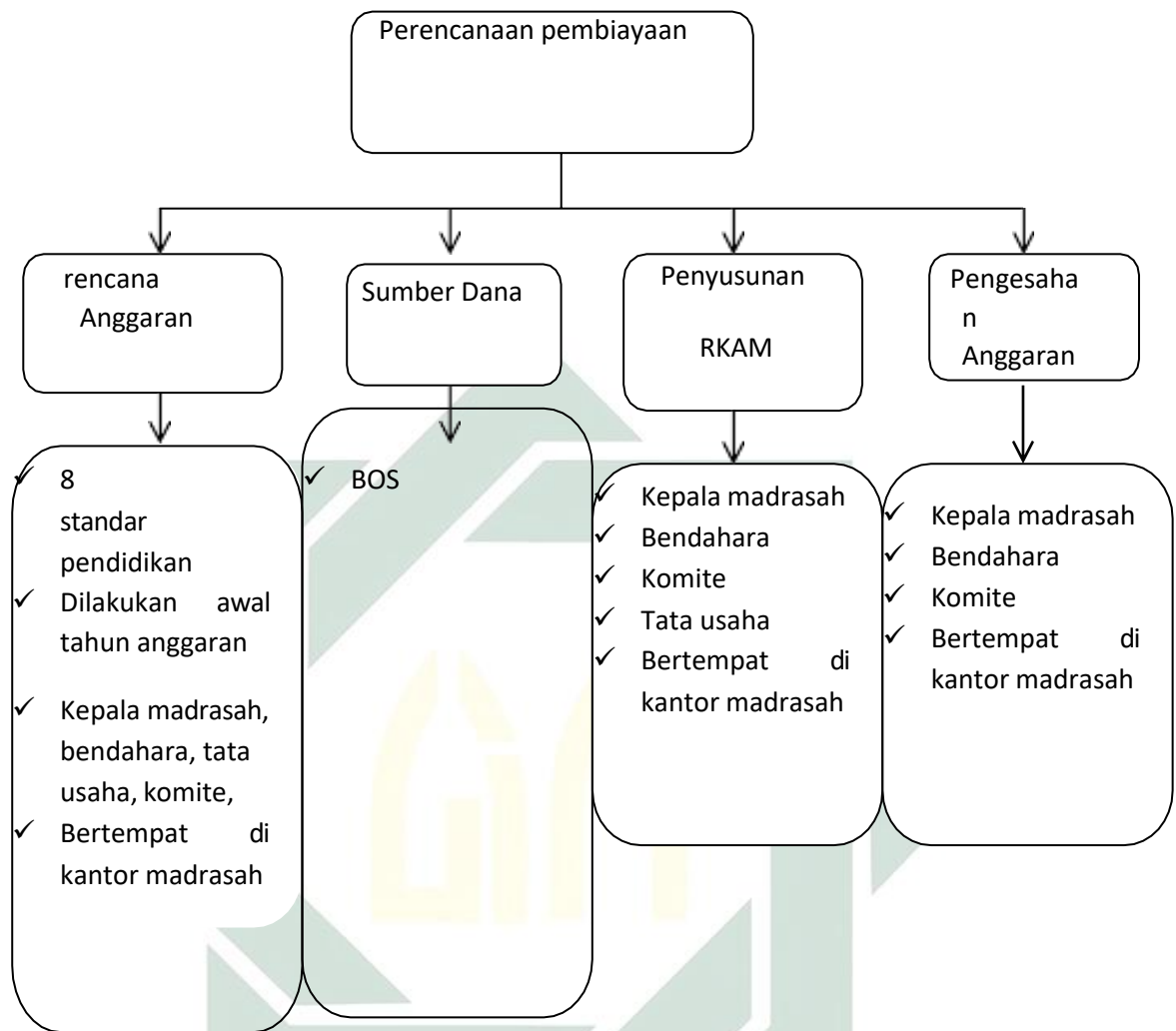
⁵⁴ Wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 25 April 2020

⁵⁵ wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 25 April 2020

Dalam hal penentuan perencanaan kegiatan madrasah saya selaku komite MA Darusslam Deru bojonegoro ikut terlibat dalam menentukan rencana kegiatan madrasah (RKAM), yang berada di kantor madrasah.⁵⁷

Data tersebut diperkuat dengan data dokumentasi alur perencanaan pembiayaan pendidikan di MA Darusslam Deru Bojonegoro yang penulis peroleh sebagai berikut

⁵⁷ Wawancara, kepala komite MA Darusslam Bojonegoro 24 April 2020



Gambar 4.1 perencanaan anggaran madrasah MA darusslam Deru

Perencanaan pembiayaan di MA Darusslam Deru. Kami terlebih dahulu melakukan rencana penyusunan anggaran sesuai skala prioritas yang diutamakan, kemudian menentukan jumlah dana yang dibutuhkan, yang kemudian akan di bagi ke dalam 8 komponen pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun. Pembagian ke 8 komponen itu adalah standar kelulusan, standar isi, satandar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dari ke delapan standar tersebut nantinya akan di bagi tiap biaya sesuai dengan kebutuhan yang di prioritaskan terlebih dahulu.⁵⁸

Perencanaan pembiayaann pendidikan dimadrasah ini dilakukan setiap tahun ajaran baru. Kalau mau mencairkan dana dari BOS, suruh buat permohonan jadi namanya RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah). Kalau sekarang BOS itu dicairkan setiap 6 bulan seumpamanya Januari-Juli berarti Januari itu pihak Madrasah sudah membuat anggaran untuk RKAM selama 1 tahun. Jadi modelnya tahun ajarannya adalah Januari kalau tahun ajaran kurikulum. Kalau keuangan anggarannya Januari-Juni dan Juli-Desember.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara, Kepala MA Darusslam Bojonegoro , 25 April 2020

Dapat disimpulkan bawah Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui Dana BOS di MA Darussalam Deru Bojonegoro melibatkan kepala madrasah, bendahara, tata usaha, komite untuk bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan memperhatikan hal apa saja yang diutamakan dalam setiap kebutuhan program yang akan dikelola.

Adapun sumber dana yang diperoleh MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari sumber, dana BOS.⁶¹

⁶¹ Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro , 26 april 2020

	2.1	Pengelolaan Kurikulum 2013	1,500,000		1,500,000
	2.2	Pengembangan Perpustakaan	1,000,000	500,000	500,000
	2.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum 2013	1,000,000	500,000	500,000
	3	Standar Proses			
	3.1	Penerimaan Peserta Didik Baru	3,500,000		3,500,000
	3.2	Pengadaan bahan habis pakai Praktikum Pembelajaran	2,400,000	1,200,000	1,200,000
	3.3	Pengadaan Buku Pelajaran / Buku Penunjang Pelajaran/Buku Bacaan	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	3.4	Pengelolaan kegiatan belajar mengajar	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	3.5	pengelolaan program Ekstrakurikuler	1,000,000	500,000	500,000
	3.6	Pengelolaan Program kesiswaan	1,000,000	500,000	500,000
	3.7	Pengembangan Ketrampilan Siswa	0		
	3.8	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Proses Pembelajaran	1,000,000	500,000	500,000
	3.9	Peningkatan mutu Proses Pembelajaran	1,000,000	500,000	500,000
	3.10	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa / Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
	4.1	Pelatihan Laboran	1,000,000	500,000	500,000
	4.2	Pelatihan Pustakawan	1,000,000	500,000	500,000
	4.3	Pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	4.4	Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan	1,000,000	500,000	500,000
	4.5	Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan Manajemen M	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	5	Standar Sarana dan Prasarana			
	5.1	Pembelian Alat Mutli media pembelajaran			
	5.2	Pembelian dan perawatan perangkat komputer	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	5.3	Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan Prasarana Pembelajaran Madrasah	1,500,000	1,500,000	
	5.4	Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana	450,000		450,000

Kelima, standar sarana dan prasarana mempunyai program pembelian alat multimedia pembelajaran, pembelian dan perawatan perangkat komputer, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran madrasah, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendukung satuan pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, perawatan alat multimedia pembelajaran, perawatan madrasah /rehab ringan dan sanitasi madrasah kelas. Keenem, standar pengelolaan mempunyai program kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dan pengelolaan perkantoran. Ketujuh, standar pembiayaan yang mempunyai program utama yakni biaya penyusunan dan pelaporan, membantu peserta didik

dalam bentuk LPJ (laporan Pertanggungjawaban) serta lampiran (Bukti transaksi) akan menjadi pijakan untuk melakukan audit.⁶⁸

1. Penerimaan dana pendidikan.

Penerimaan dana pendidikan di MA Darussalam bersumber dari pemerintah yaitu BOS. Dalam pembukuan penerimaan dana madrasah dilakukan oleh bendahara madrasah yakni bapak Koko Jatmiko dengan pencatatan terhadap setiap dana yang masuk dalam buku harian, buku ini berisi nama pendapatan dana, uang yang masuk dalam buku harian kemudian ditulis lagi dalam buku rekab pada setiap harinya, lalu dikumpulkan dijumlahkan dalam buku rekab untuk mengetahui besarnya uang yang masuk pada setiap harinya dan pada akhirnya setiap bulannya.⁷²

Dari gambar di atas dapat dijelaskan alur pembukuan keuangan yang dilakukan MA Darusslam Deru dibagi dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. Bendahara madrasah dalam penerimaan dan pengeluaran dana adalah bendahara madrasah dengan persetujuan kepala madrasah dan komite madrasah. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

1. Penerimaan Dana

Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan MA Darusslam Deru mempunyai beberapa tahapan, berikut hasil wawancara dengan bendahara madrasah :

jadi dalam hal penerimaan dana madrasah MA Darusslam Deru Bojonegoro mempunyai beberapa tahapan meliputi: 1) Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) Memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data keuangan, merupakan suatu kegiatan yang oleh lembaga madrasah ini dilakukan yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan

⁷⁴ Wawancara, bendahara MA Darussalam Bojonegoro, 28 April 2020

sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan madrasah. Diantaranya pelaporan kepada dewan guru, komite, dan pemerintah yakni pelaporan kepada kementrian agama kabupaten Bojonegoro.⁷⁵

Penerimaan biaya di MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari pendapatan rutin. Pendapatan rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS. Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan antara lain dari pengawas keuangan, bendahara, pembantu direktur keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan berasal dari siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang keuangan, sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah diterima langsung pada bendahara. Biasanya uang yang telah diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan.⁷⁶

a. Pengeluaran Dana

Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran dana di MA Darusslam Deru Bojonegoro tersebut dibagi menjadi dua yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Biaya operasional menggunakan dana yang bersumber dari BOS.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara, bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020

⁷⁶ Wawancara, bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020

⁷⁷ Wawancara, bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020

Pelaksanaan pembukuan keuangan di MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan yang dilakukan oleh MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS , dan biaya investasi berupa sarana dan prasarana. Kemudian model pembukuan yang dipakai yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.⁷⁸

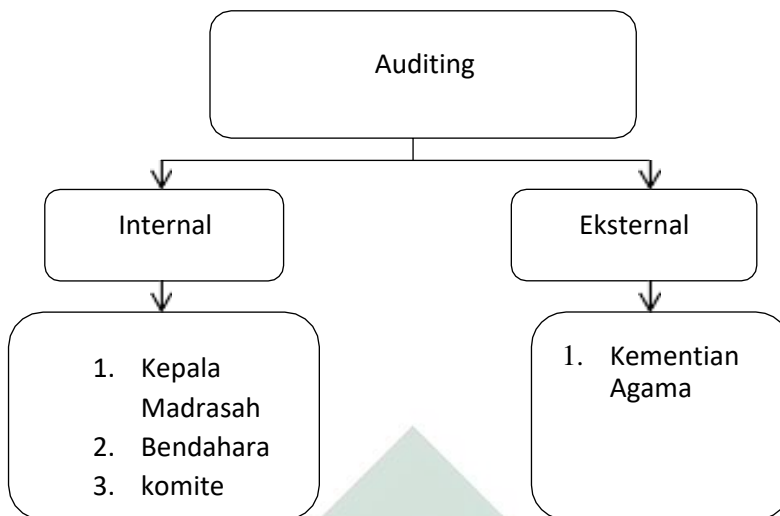
⁷⁸ Wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 April 2020

3. Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro

Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (*auditing*) pada MA Darussalam Deru Bojonegoro, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara madrasah yakni:

Auditing pembiayaan pendidikan di MA Darusslam Deru Bojonegoro dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, triwulan dan tahunan setiap pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran. Berikut data dokumentasi alur pengawasan yang penulis peroleh dalam pemeriksaan dan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan MA Darusslam Deru Bojonegoro :⁷⁹

⁷⁹ Wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 april 2020



Gambar 4.3 auditing /Pengawasan Pembiayaan MA Darusslam Deru Bojonegoro

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di MA Darusslam Deru Bojonegoro proses pengawasannya dilakukan dari dua arah yaitu dari internal dan eksternal. Walaupun lembaga ini tanahnya atas nama yayasan, tetapi untuk keuangan madrasah yayasan tidak mengikuti dalam kegiatan auditing. Berikut hasil wawancara :

a. Internal

Auditing / Pengawasan dan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh kepada madrasah, bendahara, komite dengan berkala dan berkesinambungan dengan bendahara madrasah.⁸⁰ Diperkuat oleh hasil wawancara dengan bendahara madrasah, ya Tujuannya tidak lain membantu pengawasan keuangan madrasah agar tidak terjadi ketidaksesuaian penggunaan keuangan yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Pengawasan pembiayaan di MA Darussalam Deru

⁸⁰ Wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 1 mei 2020

dilakukan oleh kepala madrasah, komite madrasah dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada bendahara.⁸¹ Pengawasan pembiayaan di bagi menjadi dua, jika dana dari pendapatan dari sumber, infak siswa/orang tua, pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah, komite.⁸² Dalam hal ini pengawasan dilakukan secara berkala untuk evaluasi diri madrasah terkait program kerja yang termuat dalam RKAM sehingga kami bisa membenahi dan memproyeksikannya⁸³ Sedangkan pengawasan kepala madrasah tersebut tidak hanya yang bersifat penggunaan internal saja melainkan penggunaan keuangan yang bersifat eksternal, seperti penggunaan yang tidak teranggarkan pada rancangan awal. Dan juga pengawasan ini berupaya membantu bendahara dengan mempersiapkan bukti-bukti keuangan yang membutuhkan legalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan anggaran. Meski demikian, bukan berarti bendahara melepaskan diri dari pengawasannya, oleh karena sifat dari pengawasan yang dilakukan kepala madrasah hanyalah sebagai pengawas yang bertujuan untuk memastikan pos penggunaan anggaranyang telah dirancang tidak melenceng dan terlaksana dengan maksimal.

Prinsip pelaksanaan pengawasan ini tergambarkan sebagai berikut: 1) Dilakukan terus menerus dan berkesinambungan; 2) Dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan

⁸¹ Wawanaara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 2 mei 2020

⁸² Wawanaara, komite MA Darusslam Bojonegoro, 2 mei 2020

⁸³ Wawanaara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 2 mei 2020

strategis; 3) Dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan pada penilaian yang objektif; 4) Berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak bertindak subjektif; 5) Pencatatan dan pelaporan yang faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi penyimpangan; 6) Orientasinya adalah masa sekarang dan masa mendatang; 7) Sifatnya edukatif atau pembinaan meskipun terjadi penyimpangan dan kesalahan; dan 8) Melakukan pencegahan secara tuntas pada setiap kesalahan atau penyimpangan.

b. Eskternal

Kegiatan auditing/ pengawasan Di MA Darusslam Deru ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan menyesuaikan program monitoring, pendampingan dan pelaporan dari kementerian agama. biasanya kami dihubungi terlebih dahulu sebelum kegiatan ini dilakukan agar kami bisa mempersiapkan laporannya Baik untuk penggunaan keuangan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental, baik yang dipergunakan dalam kurun waktu panjang maupun penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat.⁸⁴

Pengukuran tingkat keberhasilan atau tidak berhasilan penggunaan anggaran tersebut, maka MA Darusslam Deru mengikui sepenuhnya dari prosedur operasional penggunaan anggaran yang diberikan oleh pihak dinas atau instansi terkait. Selain pengawasan yang bersifat rutin, dinas atau instansi pemerintah lain yang telah juga

⁸⁴ Wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 5 Mei 2020

memberikan bantuan keuangan madrasah, juga akan serta melaksanakan pengukuran hasil kerja atas penggunaan keuangan yang telah diturunkan kepada madrasah.⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan MA Darusslam Deru dari pihak internal oleh kepala madrasah, komite, bendahara dengan cara mengecek setiap triwulan sekali kepada bendahara. Sedangkan pengawasan dari pihak eksternal oleh kementrian Agama dalam satu tahun sekali.

C. PEMBAHASAN

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS di MA Darusslam Bojonegoro

Dalam hal Perencanaan pembiayaan MA Darusslama Deru memiliki Bendahara madrasah yakni ibu Heni Susanti yang memiliki wewenang untuk mengatur pembiayaan di madrasah dan dibantu oleh kepala madrasah, kepala tata usaha, dan komite. Berikut hasil wawancara dengan bendahara madrasah, kepala madrasah, dan kepala tata usaha, komite.⁸⁶

a. Perencanaan Anggaran

Anggaran sering kali dimaknai sebagai suatu rencana, namun dalam bidang manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sering disebut dengan RKAM. Dalam istilah anggaran bukanlah suatu rencana.

⁸⁵ Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 5 Mei 2020

⁸⁶ Wawancara, kepala MA Darusslam Deru Bojonegoro, 25 April 2020

Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran” sebagai suatu rencana.⁸⁷ Menurut Liphon Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, mengemukakan empat fase pokok sebagai berikut: 1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan 4) Menilai pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.⁸⁸

Penganggaran pembiayaan di MA Darusslam Deru Bojonegoro terlihat dengan terlebih dahulu melakukan rencana penyusunan anggaran sesuai skala prioritas yang diutamakan, kemudian menentukan jumlah

⁸⁷ Hadar Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm. 109

⁸⁸ Mulyono, *Konsep pembiayaan pendidikan* Hlm 165-166

dana yang dibutuhkan, yang kemudian akan di bagi ke dalam delapan komponen pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Pembagian ke delapan komponen itu adalah standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dari ke delapan standar tersebut nantinya akan di bagi tiap *unit cost* biaya sesuai dengan kebutuhan yang di prioritaskan terlebih dahulu. Hal tersebut juga senada dengan teori yang dikemukakan oleh Nanang Fattah bahwa langkah-langkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya, 3) Menentukan program kerja dan rincian program, 4) Menghitung dana yang dibutuhkan. senada juga dengan Akdon yang menyebutkan bahwa prosedur pertama Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.⁸⁹

Penganggaran pembiayaan di MA Darussalam Deru Bojonegoro melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komit untuk bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan memperhatikan hal apa saja yang diutamakan dalam setiap kebutuhan program yang akan dikelola. Kemudian nantinya dalam *penginputan* jumlah biaya yang telah disepakati, akan dibantu oleh operator madrasah dalam memasukkan ke

⁸⁹ Rusdiana, *Pengelolaan pendidikan*, 230-231.

setiap komponennya sesuai dengan hasil akhir setelah anggaran tersebut di sahkan. Penyusunan anggaran pembiayaan MA Darusslam Deru dilakukan dengan agenda pertemuan rapat yang bertempat di kantor MA Darusslam Deru Bojonegoro. Penganggaran tersebut dilakukan setiap pada awal tahun anggaran. Kemudian setelah rangkaian prosedur penyusunan telah selesai, dilanjutkan dengan merevisi apabila ada yang kurang atau kelebihan anggaran, dilanjut dengan pengesahan yang dibubui dengan tanda tangan berstempel oleh kepala dan bendahara madrasah, diketahui oleh komite madrasah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Asfila, dkk, dalam rangka mempergunakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan pada awal tahun walupun mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan pendidikan yang direncanakan tersebut dengan memprioritas hal-hal yang penting dan mendesak.⁹⁰

⁹⁰ Asfila, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, No. 4, November 2015, 125

b. Sumber Dana MA Darusslam Deru Bojonegoro

Adapun sumber dana yang diperoleh MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari Dana BOS.⁹¹ Akdon (2015) mengemukakan bahwa sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.⁹² Senada dengan Irsan Habsyi, dalam jurnalnya mengemukakan jika sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Sumber pendapatan sekolah adalah dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan fasilitas belajar siswa. Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas sekolah”.

⁹¹ Wawancara ,bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 27 Mei 2020

⁹² Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 87.

c. Penyusunan dan RKAM MA Darusslam Deru Bojonegoro

Penyusunan RKAM di MA Darusslam Deru Bojonegoro melibatkan kepala madrasah, bendahara, tata usaha, komite. Kemudian dibantu oleh operator madrasah dalam proses *penginputan* dana per item ke dalam bentuk format dari kemendagri. Dalam kegiatan biaya operasional madrasah, pihak MA Darusslam Deru Bojonegoro menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah . Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional madrasah.

Dari tabel RKAM dokumentasi yang peneliti peroleh dapat dijelaskan bahwa operasional pembiayaan MA Darussalam Deru Bojonegoro dalam 1 tahun dikeluarkan sebanyak 2 kali. Pembagian operasionalnya mengacu kepada 8 standar pendidikan, yang masing-masing standar diuraikan kembali sesuai dengan kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan. Pertama, standar kelulusan terdapat 3 program kegiatan utama yang membutuhkan biaya yakni kegiatan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian dan penyusunan kriteria kelulusan. Kedua, standar isi terdapat tiga program utama yakni pengelolaan kurikulum 2013, pengembangan perpustakaan, pengawasan dan pengendalian kurikulum 2013. Ketiga, standar proses terdapat sepuluh program kegiatan yaitu kegiatan perlombaan sekolah, penerimaan peserta didik baru, pengadaan buku pelajaran/buku penerimaan peserta didik, pengadaan bahan habis pakai praktikum, pengadaan

buku pelajaran, penunjang pelajaran/buku bacaan, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan program ekstra kurikuler, pengelolaan program kesiswaan, pengembangan keterampilan siswa, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran, peningkatan mutu proses pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai lima pelatihan laboran, pelatihan pustakawan, pelatihan dan peningkatan kualitas pendidik, pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta manajemen madrasah.

Kelima, standar sarana dan prasarana mempunyai program pembelian alat multimedia pembelajaran, pembelian dan perawatan perangkat komputer, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran madrasah, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendukung satuan pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, perawatan alat multimedia pembelajaran, perawatan madrasah /rehab ringan dan sanitasi madrasah kelas. Keenam, standar pengelolaan mempunyai program kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dan pengelolaan perkantoran. Ketujuh, standar pembiayaan yang mempunyai program utama yakni biaya penyusunan dan pelaporan, membantu peserta didik miskin, pembelian bahan habis pakai. Kedelapan standar penilaian

pendidikan dengan program yaitu, pelaksanaan ujian.

Seperti yang termuat dalam jurnal Zulfa Jamalie mengemukakan jika proses penyusunan anggaran di madrasah sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana. Format yang digunakan untuk menyusun rencana kegiatan dan anggran madrasah pendapatan dan belanja sekolah (RKAM) meliputi : 1) sumber pendapatan antara lain BOS , 2) pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran, pengadan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan gedung dan sumber belajar, serta honorarium dan kesejahteraan. Penganggaran yang bersifat rencana dan dibuat oleh pihak-pihak yang brkepentingan dalam memajukan lembaga pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya, apalagi sekolah/madrasah swasta, maka anggaran harus disusun dan digunakan secara baik dan terarah.⁹³

Muhajirin juga menjelaskan jika dalam penyusunan RKAM, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kepala sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite

⁹³ Zulfa Jamalie, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat*, Jurnal Fenomena, Volume 9, No 1, 2017, 32

sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.⁹⁴

Untuk RKAM jumlah rencana anggarannya adalah yang diperoleh dari sumber dana BOS. Untuk operasional sekolah dipusatkan dari pendapatan dana BOS sejumlah 141.000.000. Bila dilihat dari Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, maka dalam penyusunan anggara RKAM di MA Darusslam Deru Bojonegoro terlihat terbuka untuk internal madrasah dan eksternal pada kemenag dalam keuangannya.

d. Pengesahan Anggaran

Pengesahan anggaran MA Darusslam Deru Bojonegoro disahkan oleh kepala madrasah dengan menandatangani hasil akhir dari rencana anggaran, kemudian diketahui oleh bendahara serta komite madrasah.⁹⁵ Sesuai dengan teori Hadar Nawawi yang menjelaskan bahwa, anggaran madrasah ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite madrasah⁹⁶

⁹⁴ Muhajirin, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Educational Management, ISSN 2252-7001 Vol 1, Februari 2012, 171.

⁹⁵ wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 29 Mei 2020

⁹⁶ Haidar Nawawi, *Manajemen Strategic Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan*

Dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru meliputi empat langkah pertama menentukan rencana anggaran, kedua menentukan sumber dana, ketiga menyusun rencana anggaran RKAM, keempat proses pengesahan anggaran.

2. Pelaksanaan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS

Di Madrasah Aliyah Deru Bojonegoro

Sebagaimana dikenal pada umumnya, bahwa *accounting* merupakan pembukuan atas segala jenis keuangan yang ada pada sebuah lembaga. Demikian halnya yang dijalankan oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro dalam rangka menjamin mutu madrasah yang profesional dan memiliki sistem manajemen keuangan yang baik, maka disusunlah pembukuan keuangan yang sistematis. MA darussalam mempunyai bendahara madrasah sesuai data yang penulis peroleh, bendahara mengelompokkan dana penerimaan dan pengeluaran, dan membuat buku kas

a. Penerimaan Dana

Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan ini meliputi: 1) Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) Memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang

mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data keuangan, merupakan suatu kegiatan yang oleh lembaga madrasah ini dilakukan yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan madrasah. Diantaranya pelaporan kepada kepala madrasah, komite, dan pemerintah yakni pelaporan kepada kemenag melalui perwakilannya di kecamatan Sumberrejo .

b. Pengeluaran Dana

Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran dana di MA Darussalam Bojonegoro yaitu biaya operasional menggunakan dana yang bersumber dari BOS.⁹⁷ Hal ini sesuai dengan peraturan menteri Agama No 90 tahun 2003 yaitu pembiayaan tersebut dipergunakan sebagai biaya investasi, biaya operasi dan personal yang mengarah pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Biaya investasi madrasah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

⁹⁷ Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 Mei 2020

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya, Sesuai dengan teori Mulyasa mengemukakan bahwa pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas.

Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Senada juga dalam teori Akdon struktur biaya pendidikan terdiri dari, a) biaya satuan pendidikan, b) biaya personal, dan c) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Sudah terlihat secara terperinci dana-dana yang dikeluarkan, dan dana masuk yang didapat. Kemudian dalam kegiatan pembukuan keuangan selain menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, madrasah tersebut menggunakan metode akrual basis dengan mencatat transaksi yang sedang dilakukan meskipun belum menerima atau mengeluarkan uang kas.

Jenis model yang digunakan dalam pembukuan menggunakan model turunan delapan standar nasional pendidikan. Kalau dalam teori Akdon biasa disebut dengan model *fishbone*, yaitu konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah model tulang ikan dari Ishikawa. Penentuan biaya sekolah dikelompokkan menjadi 8 komponen, hal ini sesuai

dengan standar komponen pendidikan nasional.⁹⁸

Penerimaan biaya di MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari pendapatan rutin. Pendapatan rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS, dan infak siswa/orang tua. Sebagaimana menurut Siagian bahwa penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh madrasah baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah . Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penerimaan keuangan madrasah tersebut bersumber dari pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah dan sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat.

Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan antara lain dari pengawas keuangan, bendahara keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan berasal dari siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang keuangan, sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah diterima langsung pada bendahara. Biasanya uang yang telah diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan.⁹⁹ keuangan di MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Siagian, Harbanga, *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik*, 133.

pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

Dari data di atas, disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan yang dilakukan oleh MA Darussalam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS. Kemudian model pembukuan yang dipakai yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

3. Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro

Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (*auditing*) pada MA Darussalam Deru Bojonegoro, dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, triwulan dan tahunan setiap pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran.

Penilaian merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam kegiatan pembiayaan pendidikan. Dengan penilaian, kepala sekolah akan mengetahui tingkat keberhasilan pembiayaan program pendidikan dengan menggunakan dana dari pemerintah. Aktivitas penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan RKAM kedepan, hingga dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang barang kali perlu dilakukan.

Pendapat penulis ini diperkuat oleh Hasibuan dalam buku manajemen pendidikan teori dan praktik bahwa evaluasi ialah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti program tersebut efektif, jika sebaliknya, maka program tersebut dinyatakan tidak efektif atau gagal.¹⁰⁰

Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga disebut dengan evaluasi ataupun evaluation involves auditing. Pertanggungjawaban (auditing) menurut Cormark (1970) merupakan

¹⁰⁰ Hasibuan, *Manajemen Pendidikan "aplikasi dalam penyusunan rencana pengembangan madrasah"*, (Jakarta: Putra Rafika, 2010), hlm 375.

pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak- pihak yang terkait¹⁰¹

Evaluasi dana pendidikan di MA Darussalam Bojonegoro dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dengan cara mengecek setiap awal bulan serta akhir bulan kepada bendahara. Pengawasan bertujuan untuk memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan di MA Darusslam Bojonegoro. Pemantauan ini dilakukan dengan cara mengetahui bukti-bukti atau transaksi yang sah baik pengeluaran maupun pemasukan keuangan. Selanjutnya kepala madrasah menilai hasil pantauanya apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau belum yang selanjutnya diambil tindakan perbaikan terhadap hal-hal yang belum sesuai dengan yang dikehendaki. Pemeriksaan disini dilakukan terhadap pendapatan keuangan madrasah, pengeluaran keuangan madrasah serta pelampiran bukti transaksi yang digunakan.

a. Pendapatan Keuangan Madrasah.

Pemeriksaan terhadap pendapatan keuangan madrasah di MA Darusslam Bojonegoro dilakukan dari dua arah yaitu dari arah internal dan eksternal madrasah. Dari arah internal dilakukan oleh kepala madrasah, bendahara madrasah, komite madrasah dan dari eksternal madrasah dilakukan oleh pihak kementrian agama tingkat kabupaten kota. Pemeriksaan

¹⁰¹ Mulyono, *Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm 66.

ini menilai mengenai sumber-sumber dana yang bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS.

b. Pengeluaran Keuangan Madrasah

Pemeriksaan terhadap pengeluaran keuangan madrasah bertujuan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang yang ada maka bendahara harus dapat menjelaskannya. Di MA Darusslam Bojonegoro pemeriksaan terhadap kas madrasah dilakukan kepala madrasah.

c. Pelampiran Bukti.

Pelampiran bukti-bukti transaksi pengeluaran keuangan madrasah baik yang nominalnya sedikit maupun nominalnya banyak. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara dan kepala madrasah kepada komite madrasah, wali murid, dan kepada tim kementrian agama tingkat kabupaten kota setempat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program bos yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro meliputi empat langkah yaitu menentukan sistem perencanaan anggaran. Rencana anggaran, menentukan sumber dana, menyusun rencana anggaran kedalam format RKAM, dan proses pengesahan anggaran.
2. Pelaksanaan Pembukuan Melalui Program BOS yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan rutin yaitu dari sumber BOS pusat. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS pusat. Model pembukuan yang dipakai yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Serta jenis buku yang digunakan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.
3. Auditing/ pengawasan pembiayaan pendidikan melalaui dana BOS MA Darusslam Deru Bojonegoro dilakukan dari dua arah yaitu pengawasan dari pihak internal madrasah dan eksternal oleh kementrian Agama.

B. SARAN

Dengan memperhatikan pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Madrasah dalam pelaksanaan keuangan dengan dana BOS harus digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin agar tidak mengalami kekosongan keuangan dalam kas madrasah mengingat penyaluran dana BOS di salurkan selama tiga bulan sekali (triwulan).madrasah juga bisa menggali dana lain semisal dengan mengadakan wirausaha dengan masyarakat setempat, pengumpulan dana melalui pengajian.
2. Dalam penggunaan dana BOS dari pemerintah harus digunakan seoptimal mungkin agar kualitas MA Darussalam Bojonegoro bisa maksimal dan melakukan inovasi secara terus-menerus demi terwujudnya mutu madrasah yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan lembaga yang lain.
3. Kepala madrasah dan bendaharawan untuk lebih meningkatkan pengawasan yang terkait penggunaan dana BOS. Untuk itu, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan Pengawasan penggunaan keuangan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pratowo, 2011, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-ruzz Media, 2011)
- Arsyad Azhar, *Pokok Manajemen : Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*, 2002 (yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Burhan Bungin. 2011, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group)
- Barnawi dan M. Arigfin, 2012, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media)
- Danim, Sudarwan, 2008, *Visi Baru Manajemen Sekolah, Dari Unit Birokrasi ke Akademik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Didin Kurniadin dan imam machali, 2012, *manajemen Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiyaji Akbar, 2000, *Metodologi Peneliian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara)
- Harsono, 2007, *Pengelolaan Pndiidkan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher)
- Haidar Nawawi, 2005, *Manajemen Strategic Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hasibuan, 2010, *Manajemen Pendidikan”aplikasi dalam penyusunan rencana pengembangan madrasah”*, (Jakarta: Putra Rafika)
- Hadari Nawawi dan Mimim Martini. 1992, *Penelitian Terapan*. (Yogyakarta : Rajawali Press)
- Ibrahim Bafada, 2006, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Irianto Agus, 2010 *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembngunan suatu Bangsa*, (Jakarta : Kencana)
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).
- Muhammad Syafii Antonio dan Tim Tazkia, 2010, *Kepemimpinan dan Strategi Militer*, Meleong Lexy. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Moh. Kasiran. 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Yogyakarta : Sukses Offset)
- Moleong Lexy. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Mulyono, 2010, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar-ruzz media)
- Marno & Triyo Supriyanto, 2008, *Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama)
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta).
- Rusdiana, 2015, *Pengelolaan pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta)
- Sanjaya Wina, 2010, *Startegi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*, (Jakarta : Kencana)
- Sutikno M. Sobry, 2012, *Manajemen Pendidikan*, (Lombik : Holistica)
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabet)
- Sagala Syaiful, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan*
- T Hani Handoko, 2013, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE,)

Jurnal :

Asfila, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, No. 4, November 2015

Durotun Nafisah, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah*, Economic Education Analysis Journal, Vol 3 p-ISSN 2252-6544, e-ISSN 2502-356X, 2017, 790.

Muhajirin, 2012, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat, Jurnal Educational Management, ISSN 2252-7001 Vol 1, Februari

Zulfa Jamalie, 2017, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat, Jurnal Fenomena, Volume 9, No 1

